

DAFTAR PUSTAKA

Buku buku :

- Abdul Wahab, Solichin, 2014. *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara)*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* edisi kedua, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Effendy, Khasan, 2010. *Memadukan Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : CV. Indra Prahasta.
- Latief, Abdul. 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijakan pada pemerintah daerah*. UII Press, Yogyakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2001, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) I*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu. 2005, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) II*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013, *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta, Bumi Aksara
- Maulidiah, Sri. 2014, *Pandangan Umum Terhadap Konsep Otonomi Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*.
- Ndraha, Taliziduhu. 2011, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) II*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant, 2006. *Analisis Kebijakan Negara*. Elexmedia Jakarta.
- Pasolong, Herbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*, alfabeta, Bandung.

Sujianto. 2008. Implementasi Kebijakan Publik (konsep, Teori, dan Praktek) Alaf Riau. Pekanbaru.

Syafiie, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan (Edisi Revisi)*. Bandung, Mandar Maju, Bandung.

Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung, PT. Refika Aditama.

Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung : Refika Aditama.

Spelt, N.M dan J.B.J.M. Ten Berge. 1993. Pengantar Hukum Perizinan, Penerbit Yuridika, Surabaya.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik : Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta, CAPS.

Zulkifli.Dkk. 2013. Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja. Pekanbaru, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

Dokumentasi

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Hasil Amandemen dan proses Amandemen Secara Lengkap. 2004. M2S. Bandung..

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.